

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi sektor publik merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lembaga publik mendapatkan tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan dari setiap instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi di Pemerintah Pusat, Provinsi maupun daerah.

Reformasi yang terkait dengan penyajian laporan keuangan daerah ditandai dengan berlakunya Permendagri Nomor 64 tahun 2013, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah seluruh Indonesia ditandai dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum yaitu untuk meningkatkan kemandirian daerah tersebut, untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2010).

Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berbagai faktor dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, salah satunya adalah kualitas laporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan

dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Pemenuhan tujuan dan laporan keuangan akan bermanfaat dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Selain kualitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Setiap daerah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan operasional, dan kalk, setiap akhir tahun periode anggaran. Semakin baik penyajian laporan keuangan maka akan berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas publik. Dengan adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan yang mengarahkan untuk mengimplementasikan *good governance* maka pemerintah daerah tidak dapat lagi menutup-nutupi kondisi keuangan dari publik.

Akuntabilitas tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, namun juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi. Perkembangan pengetahuan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan di daerah agar lebih transparan dalam menyusun laporan keuangan. Pemerintah harus dapat menyusun laporan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemerintah diwajibkan untuk selalu teliti dalam menyusun suatu laporan keuangan agar tidak menimbulkan suatu pertanyaan yang menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah. Agar masyarakat dapat mengakses laporan keuangan yang telah dihasilkan pemerintah daerah harus mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui internet maupun surat kabar. Namun upaya perbaikan mengenai penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya

oleh pemerintah daerah. Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Organisasi yang mengelola dana masyarakat harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pemerintah perlu mengakses laporan keuangan yang dibuatnya agar masyarakat dengan mudah memperoleh laporan keuangan tersebut. Aksesibilitas merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi laporan keuangan dengan mudah melalui media seperti, surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website.

Aksesibilitas juga mempengaruhi akuntabilitas, aksesibilitas menurut tata ruang adalah ketersediaan atau keadaan hubungan dari satu tempat ke tempat lainnya. Aksesibilitas dalam organisasi publik dapat ditingkatkan dengan dibuatnya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada *stakeholder* adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas daerah tersebut. Supaya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD saja, tetapi juga

menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas agar laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah.

Penggunaan informasi keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Pemerintah harus dapat meningkatkan penggunaan informasi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, upaya pemerintah dalam mengatur pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik, namun perbaikan tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah Kota Palembang yang mendapat 8 kali berturut-turut dari tahun 2010-2017 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi masyarakat tidak mengetahui laporan keuangan yang tidak di publikasikan.

Tabel.1.1
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kota Palembang

Tahun	Opini BPK
2010	WTP
2011	WTP
2012	WTP
2013	WTP
2014	WTP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP

Sumber: BPK (2017)

Setiap hasil temuan dari BPK mengenai penyajian laporan keuangan maupun dokumen-dokumen terkait akan ada proses pertanggungjawaban dari setiap instansi yang bersangkutan. Selain rendahnya kualitas penyajian laporan keuangan dan masih sulitnya akses publikasi laporan keuangan tersebut oleh publik mengindikasikan rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terjadi.

Sedangkan Pemkot kota Palembang hanya membuat aplikasi e-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yaitu aplikasi ini berisi tentang kinerja Pemerintah Kota Palembang dari semua OPD dari sistem perencanaannya, sampai pada rencana strategis kerja setiap OPD. Menurut Harobin Mustofa selaku Sekda Kota Palembang dalam tribunnews, dengan adanya aplikasi e-Sakip masyarakat bisa mengetahui secara langsung kinerja pemerintah kota Palembang. Seharusnya Pemerintah Kota Palembang juga membuat sebuah aplikasi tentang akuntabilitas keuangan sehingga masyarakat bisa melihat hasil laporan keuangan setiap OPD di kota Palembang.

Undang-undang yang mengatur tentang akuntabilitas sektor publik, telah mengalami perubahan mendasar dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada

stakeholders. Namun upaya perbaikan mengenai penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari *single entry* menuju *double entry* merupakan perubahan yang cukup revolusioner (Hehanussa, 2015).

Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui berbagai media cetak maupun elektronik, belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pasal 116 ditambahkan satu ayat, yaitu ayat 4a yang bunyinya yaitu “Untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas, Penyajian, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah OPD Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah OPD Kota Palembang?
3. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah OPD Kota Palembang?

4. Bagaimana pengaruh kualitas, penyajian, dan aksesibilitas laporan keuangan secara silmutan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah OPD Kota Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai kualitas, penyajian, aksesibilitas laporan keuangan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini di lakukan pada pemerintah Kota Palembang dengan objek penelitian pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah diuarikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah OPD Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah OPD Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah OPD Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas, penyajian, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah OPD Kota Palembang.

1.4.1 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain yaitu:

1. Bagi peneliti

Sarana untuk menambah wawasan mengenai kualitas, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh kualitas, penyajian, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang.

3. Bagi Lembaga

Sebagai sebuah perkembangan ilmu akuntansi dan untuk menambah pengetahuan mengenai akuntansi pemerintah daerah.